Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services
P-ISSN: 2723-6773; E-ISSN: 2746-0533

Available at: http://jscs.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jscs

Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, 2 (2): 159-168, 2021

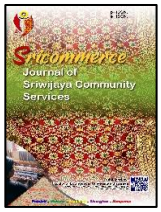

Pendampingan Dan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Kabupaten Pesawaran

Fikri Rizki Utama[1*]

[1]Fakultas Ekonomi, STIE Al-Madani, Bandar Lampung, Indonesia
* Email korespondensi: fr7@almadani.ac.id

Info Artikel: Diterima: 04 Januari 2021; Disetujui: 03 November 2021; Dipublikasi: 13 November 2021

Abstract: Setiap entitas dituntut untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan menunjukkan kinerja entitas yang dapat digunakan oleh pihak internal atau eksternal dalam mengambil suatu keputusan BUMDes sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara dalam skala mikro perlu pendampingan dalam hal pengelolaan dan penyusunan pelaporan laporan keuangan mengingat regulasi dan PSAK tentang entitas ini masih cukup baru sehingga belum banyak pelaku BUMDes yang memahami proses adopsi regulasi tersebut ke dalam pelaporan keuangan entitas. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif. Ada tiga metode pengumpulan data dalam pengabdian ini, yakni; wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dari hasil pendampingan dan penyusunan laporan keuangan, BUMDes terbantu dalam menyiapkan laporan keuangan yang sesuai SAK-ETAP.
Keywords: Pendampingan; Penyusunan; BUMDes.

Kutipan:
Utama, F.R. (2021). Pendampingan Dan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Kabupaten Pesawaran. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, 2*(2): 159-168. DOI: https://doi.org/10.29259/jscs.v2i2.58

1. PENDAHULUAN

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa. Secara sederhana untuk memahami BUMDes, kalau di pusat ada BUMN, di daerah ada BUMD, dan di desa ada BUMDes. BUMDes adalah badan usaha, dengan tujuan mencari keuntungan yang nantinya digunakan sebesar-besarnya untuk kemanfaatan desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes sendiri merupakan amanat dari Permendes No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan, dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes sudah ada sejak sebelum UU Desa No 6/2014. Tetapi paska UU Desa, BUMDes menjadi semakin strategis. Pendirian BUMDes menjadi Program Prioritas Kementrian Desa di tahun 2017 (blog.bumdes.id).

Kesejahteraan masyarakat desa masih menjadi sorotan utama karena sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia masih didominasi oleh pedesaan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 yang tinggal di wilayah pedesaan adalah 12,85 persen atau sekitar 15,15 juta jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada tahun yang sama yang tinggal di wilayah perkotaan adalah 6,69 persen atau sekitar 9,99 juta jiwa (BPS, 2019).

Tabel 1. Perkembangan Penduduk Miskin Kota-Desa di Indonesia

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
KOTA	10.65	10.34	10.67	10.14	9.99
DESA	17.94	17.67	17.10	15.81	15.15

Sumber: BPS (2019)

Penduduk miskin yang banyak dari pedesaan dan sejalan dengan tingkat kenaikan urbanisasi, tidak sesuai dengan Alokasi Penerimaan Kredit Usaha (KU) dan Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) Desa yang justru tiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut Alokasi nya selama 2017-2018 :

Tabel 2. Tabel Alokasi Penerimaan KU dan JPK

	2017	2018
Rumah Tangga Penerima KU (%)	19.08	21.61
Rumah Tangga Penerima JPK (%)	66.76	72.02

Sumber: BPS (2019)

Hal ini menunjukkan adanya pemberdayaan ekonomi yang masih kurang merata di daerah pedesaan. Termasuk belanja desa yang masih didominasi oleh belanja fisik, bukan bersifat pemberdayaan produktif yang mampu mensejahterakan perekonomian masyarakat desa (Harto dan Riswandari, 2018).Salah satu alternatif pemberdayaan produktif masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disingkat BUMDes. BUMDes adalah suatu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang semakin komprehensif mengatur tentang BUMDes, perkembangan jumlah BUMDes di Indonesia pun tergolong sangat pesat. Pada akhir tahun 2014 jumlah BUMDes di Indonesia terdapat 1.022 unit dan melonjak pada awal tahun 2017 menjadi 18.446 unit (kompas.com).

Di Provinsi Lampung sendiri, 144 Desa di kabupaten Pesawaran sudah membentuk BUMDes. Salah satu kegiatan BUMDes adalah menjual kebutuhan pokok. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini akan diadakan di BUMDes Mutiara Sakti yang berlokasi di Dusun Shalahudin Desa Negeri Sakti Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran. BUMDes Mutiara Sakti dibentuk pada tanggal 5 agustus 2017 sesuai dengan SK Kepala Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Penempatan Pengurus BUMDes.

Pada hasil penelitian Sumaryadi dan Saputra (2017) menemukan bahwa faktor utama yang menghambat upaya BUMDes dalam mencapai tujuan adalah rendahnya kualitas SDM aparatur. Dan upaya mengatasi kendala tersebut melalui program pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Subang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Agak sedikit berbeda, pada hasil penelitian Irawati dan Martanti (2017) yang meneliti transparansi pengelolalaan laporan keuangan BUMDes menunjukkan bahwa dalam organisasi sektor publik memiliki peran utama dalam menyediakan laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja organiasasi, sedangkan untuk kebutuhan eksternal untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diharapkan BUMDes dapat meningkatkan dalam pengelolaan laporan keuangan desa berdasarkan kinerja, transparasi, akuntabilitas. Hal ini dapat terwujudkan dengan adanya keinginan para aparatur desa dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan publik yang dapat akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kemudian pada penelitian Harto dan Riswandari (2018) menunjukkan satu dari semua hambatan-hambatan adalah adanya laporan pertanggungjawaban yang dimiliki BUMDes adalah suatu syarat yang sangat penting untuk dibuat oleh masing-masing BUMDes. Laporan pertanggungjawaban BUMDes terdiri dari 5 BAB. Dari 5 bab tersebut, laporan keuangan menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban yang masih dirasa sulit untuk dipenuhi oleh beberapa

BUMDes. Temuan tersebut berdasarkan laporan audit keuangan BUMDes oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD).

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Kurniawan dan Firmansyah (2018) mengatakan bahwa masalah terbesar yang menghambat penerapan akuntansi desa di Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan tidak adanya pihak yang memeriksa pelaporan keuangan. Sedangkan solusi terbaik agar akuntansi desa dapat diimplementasikan dengan baik sehingga diperlukan *software* akuntansi untuk membantu penyusunan pelaporan keuangan dan harus ada pihak yang melakukan pengecekan pelaporan keuangan tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan kendala-kendala sebelumnya Menurut Kusmayadi, et. al (2019), kendala kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi agenda yang menghambat perkembangan BUMDes. Tingkat pendidikan sebagian kepala desa dan para perangkat desa adalah salahsatunya. Kualitas SDM sangat mempengaruhi kemampuan seorang kepala desa untuk merumuskan kebijakan ekonomi bagi desanya. Tetapi yang paling krusial adalah, seorang kepala desa harus memahami bahwa sekarang ini posisinya sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi desanya. Selain itu, kesalahan dalam identifikasi potensi dan pemilihan jenis usaha, kurangnya kesiapan dan kurangnya evaluasi kinerja, serta audit laporan keuangan (blog.bumdes.id).

Serta yang teranyar, kendala juga ditemukan pada hasil penelitian Lintong, et. Al (2020) yang menunjukkan pertanggungjawaban pengelola BUMDes kepada stakeholders belum memiliki laporan keuangan yang lengkap. Laporan yang dibuat berupa laporan kas harian, yang menggambarkan kas masuk dan kas keluar. Hal ini tidak menggambarkan posisi keuangan akhir periode dan tidak diketahui keuntungan dan atau kerugian entitas pada periode tententu. Padahal Pedoman Kementerian Keuangan tentang laporan keuangan BUMdes, laporan keuangan yang harus dibuat oleh pengelola BUMDes yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan equitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, sepertinya salah satu faktor utama dari hambatan-hambatan yang terjadi di BUMDes adalah lemahnya kualitas sumber daya manusia. BUMDes Mutiara Sakti sudah beroperasional sejak 2018 namun disebabkan kurangnya SDM yang memadai membuat penyusunan laporan keuangan masih belum disusun dengan semestinya sehingga diharapkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat ini akan mampu membantu BUMDes Mutiara Sakti dalam peyusunan laporan keuangan yang sesuai peraturan akuntansi yang berlaku umum.

2. STUDI PUSTAKA

Menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pembentukan BUMDes merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah perekonomian masyarakat dengan cara memobilisasi pengelolaan aset desa serta membantu dan mendukung usaha kecil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Aset desa yang dimaksud disini sesuai dengan yang tertera dalam UU No 6 Tahun 2014 Bab 8 pasal 76,yaitu tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik (Yusnaini, *et.al.,* 2020).

Pada UU No 6 tahun 2014 bab 10 pasal 88 (2) menyatakan bahwa pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dan pada pasal 24 Huruf g berisi; “Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari kedua peraturan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa BUMDes memiliki

tanggungjawab untuk membuat laporan keuangan sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas BUMDes kepada masyarakat.

2.1 Pendampingan dan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan (fasilitas) yang diberikan pendamping kepada BUMDes dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kemandirian siswa secara berkelanjutan dapat diwujudkan (Direktorat Bantuan Sosial, 2007: 4). Sedangkan penyusunan adalah suatu kegitan yang dilakukan untuk memproses data dari bukti-bukti transaksi BUMDes dengan mengikuti aturan akuntansi yang berlaku umum. Pendampingan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes pada dasarnya bisa menjadi solusi bagi kurang / lemahnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang ada di BUMDes. Hal ini dikarenakan dengan pendampingan dan penyusunan diharapkan petugas / pegawai BUMDes mendapat motivasi, fasilitas, dan pengetahuan terkait laporan keuangan.

Pendampingan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes ini dibutuhkan sebab BUMDes perlu diarahkan dan diberi fasilitas untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP. Sehingga nantinya berdampak bagi kebaikan desa juga. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memberi pendampingan kepada BUMDes Mutiara Sakti tentang model laporan keuangan BUMDes Mutiara Sakti yang baik dan benar.
2. Memberi pendampingan kepada BUMDes Mutiara Sakti terhadap pentingnya laporan keuangan BUMDes Mutiara Sakti yang sesuai SAK-ETAP.

Selain itu pengabdian ini juga memiliki manfaat untuk BUMDes yaitu; bagi bendahara dan pegawai BUMDes Mutiara Sakti, terbukanya pemahaman tentang model laporan keuangan dan pentingnya laporan keuangan yang sesuai SAK-ETAP dan bagi BUMDes Mutiara Sakti, terbantunya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP. Serta, sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bendahara dan pegawai BUMDes Mutiara Sakti di Pesawaran.

3. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan pendekatan metode kualitatif. Menurut Moleong (2010) penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari partisipan yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data untuk penelitian. Berdasarkan data yang diperoleh, peneliti mendeskripsikan proses untuk mendesain model laporan keuangan BUMDes, sehingga menghasilkan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Sumber data diperoleh melalui:

1) Orang / pelaku, dalam hal ini Pengelola BUMDes, yaitu Direktur dan Bendahara.
2) Kejadian / Aktivitas, yaitu aktivitas usaha dari BUMDes berupa catatan-catatan pembelian, penjualan, nota-nota biaya, dan lainnya.
3) Dokumen, berupa laporan kas harian, buku catatan pembelian bahan/barang, struktur organisasi dan job descriptionnya, dan Keputusan Hukum Tua tentang Susunan Kepengurusan BUMDes dan Pengawas.

Metode pengumpulan data, merupakan jembatan yang menghubungkan peneliti dengan fenomena sosial yang ditelitinya (Efferin, et. al., 2008). Berikut ini tiga metode pengumpulan data dalam pengabdian ini, yaitu:

1) Wawancara, beberapa hal yang perlu dikonfirmasi terkait pendirian BUMDes, alokasi dana dari pemerintah desa per tahunnya, jenis-jenis usaha dari BUMDes, perkembangan usahanya, pembagian tugas pengurus, pengendalian internalnya, mekanisme pelaporannya dan jenis-jenis laporan yang dibuat per hari, per bulan dan per tahun.
2) Observasi, pelibatan diri secara langsung dan mengamati aktivitas keseharian dari BUMDes, yaitu proses transaksi pembelian, penjualan, dan aktivitas operasional lainnya.
3) Analisis dokumen, kolektifitas data yang berasal dari catatan-catatan tertulis dari pengurus BUMDes dan pengawas, dengan beberapa tahapan, yaitu kompilasi dokumen,

pemilahan dokumen, analisis mendalam, dan pengambilan simpulan. Catatan-catatan yang diperoleh berupa: buku harian kas, pembelian bahan/barang dagangan, penjualan, pengeluaran, catatan per unit usaha, kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi, dan kontrak-kontrak dengan pihak ke-3.

Berdasarkan data yang terkumpul, maka disajikan laporan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penarikan kesimpulan, merupakan kegiatan alur ketiga. Kesimpulan final akan muncul setelah pengumpulan data berakhir berdasarkan data-data yang telah disajikan untuk menggambarkan hasil desain laporan keuangan (Lintong, et. al).

Dalam kegiatan pendampingan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes, mitra langsung diajak sebagai peserta kegiatan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan. Mitra berperan aktif untuk kelancaran kegiatan karena mitra yang akan menyusun laporan keuangan BUMDes. Pentingnya partisipasi aktif dari mitra karena mitra sangat perlu untuk penyelenggarakan penyusunan laporan keuangan BUMDes yang sesuai dengan SAK-ETAP. Sehingga mitra sebagai pengurus BUMDes menjadi merasa lebih mudah dalam mengurus keuangan terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Berikut ini rancangan kegiatan pengabdian yang dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Rancangan kegiatan pengabdian

Dari gambar rancangan evaluasi diatas maka bisa diuraikan beberapa materi yang akan diserahkan ke mitra sebagai bentuk aplikasi kegiatan pengabdian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Diskusi awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang mendalam mengenai pengelolaan keuangan BUMDes Mutiara Sakti
2) Setelah melakukan identifikasi kebutuhan, maka dilanjutkan dengan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
3) Melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes Mutiara Sakti
4) Mengevaluasi tingkat keberhasilan kegiatan

Tabel 3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

No.	Kegiatan	Tempat	2020			Keterangan
			1	2	3	
1	Perencanaan kegiatan Pengabdian	STIE Al-Madani	√			
2	Mengirim surat dan koordinasi dengan Direktur BUMDes		√			
3	FGD (identifikasi kendala dan potensi)		√			
4	Pendampingan penyusunan laporan keuangan	BUMDes Mutiara Sakti		√	√	
5	Evaluasi kegiatan				√	
6	Pembuatan laporan akhir				√	

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan serta penyusunan laporan keuangan BUMDes Mutiara Sakti kabupaten Pesawaran. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada bendahara dan pegawai BUMDes mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP.

4.1 Deskripsi Kegiatan Pendampingan dan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes

Pendampingan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes dilakukan setelah identifikasi kendala dan potensi di gedung BUMDes. Pendampingan ini dilakukan dengan cara memberikan model laporan keuangan BUMDes yang baik dan benar serta memberi masukan pentingnya laporan keuangan BUMDes yang sesuai SAK-ETAP kepada Direktur, Bendahara, dan pegawai BUMDes Mutiara Sakti.

Dari BUMDes yang telah diberikan pendampingan, tim pengabdian biasanya lebih banyak melakukan diskusi dengan Bendahara sebab Bendahara yang menyusun laporan keuangan BUMDes. Dengan demikian, dari kegiatan pendampingan ini diharapkan Bendahara BUMDes dapat lebih memiliki wawasan mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan BUMDes yang sesuai SAK-ETAP sehingga dapat menghasilkan laporan yang lebih transparan dan dapat dipercaya.

Adapun aplikasi yang diberikan kepada BUMDes dalam mempermudah menyusun laporan keuangan BUMDES adalah sebagai berikut:

a. Daftar akun yang dibutuhkan oleh BUMDes

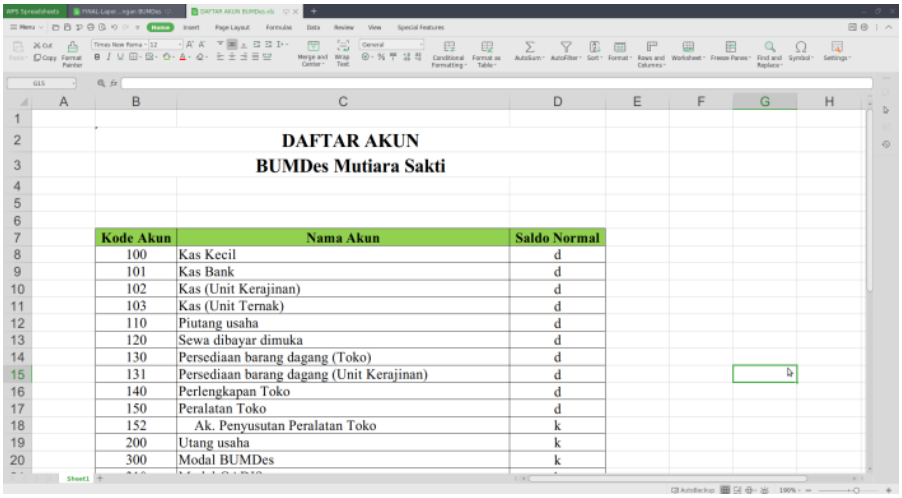

DAFTAR AKUN
BUMDes Mutiara Sakti

Kode Akun	Nama Akun	Saldo Normal
100	Kas Kecil	d
101	Kas Bank	d
102	Kas (Unit Kerajinan)	d
103	Kas (Unit Ternak)	d
110	Piutang usaha	d
120	Sewa dibayar dimuka	d
130	Persediaan barang dagang (Toko)	d
131	Persediaan barang dagang (Unit Kerajinan)	d
140	Perlengkapan Toko	d
150	Peralatan Toko	d
152	Ak. Penyusutan Peralatan Toko	k
200	Utang usaha	k
300	Modal BUMDes	k

Gambar 2. Menu daftar akun

b. Jurnal

Gambar 3. Menu jurnal

c. Laporan Laba Rugi

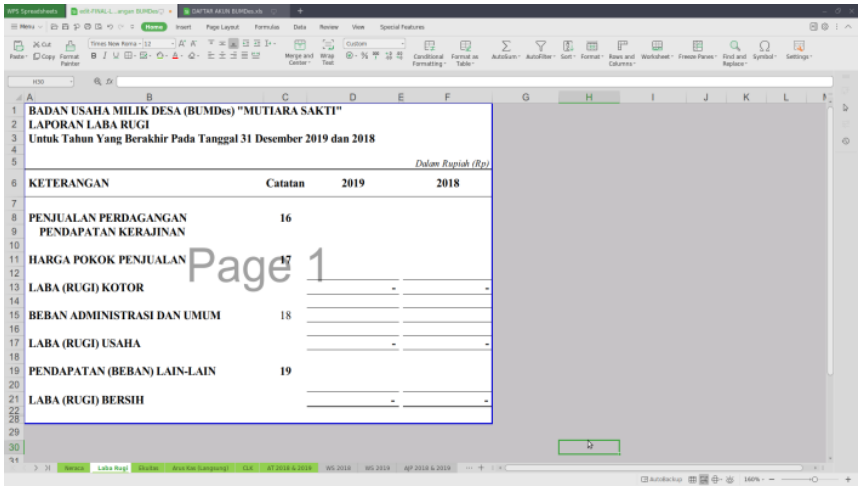

Gambar 4. Menu laporan laba rugi

d. Laporan Perubahan Ekuitas

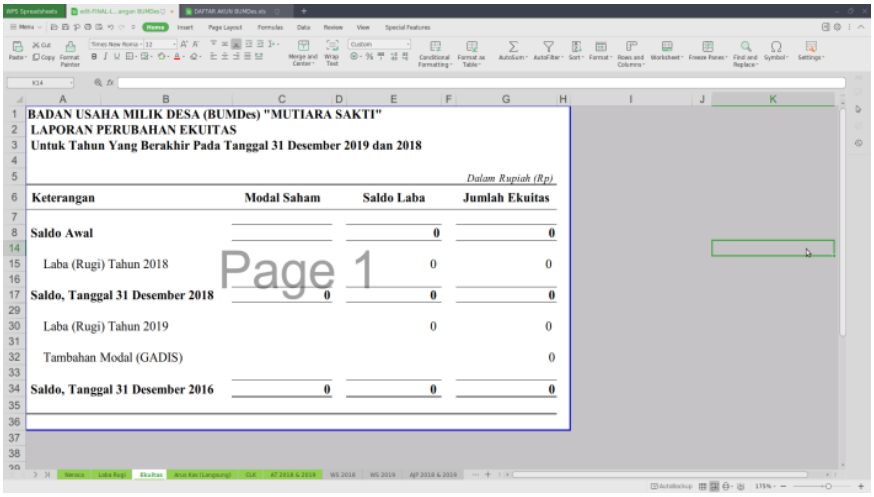

Gambar 5. Menu laporan perubahan ekuitas

e. Laporan Arus Kas

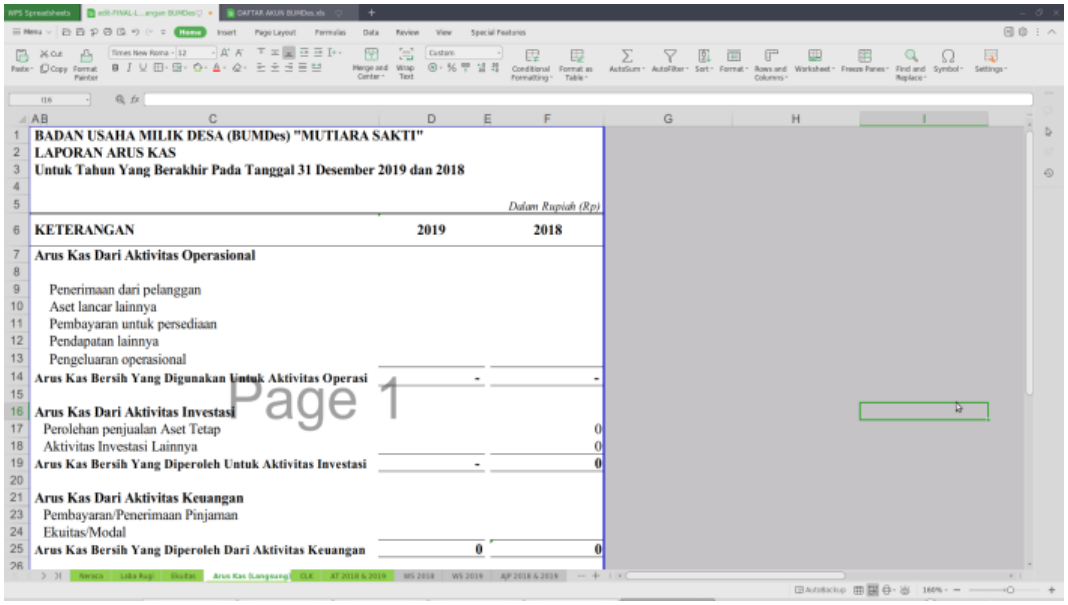

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MUTIARA SAKTI"
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Dalam Rupiah (Rp)

KETERANGAN	2019	2018
Arus Kas Dari Aktivitas Operasional		
Penerimaan dari pelanggan		
Aset lancar lainnya		
Pembayaran untuk persediaan		
Pendapatan lainnya		
Pengeluaran operasional		
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi	-	-
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Perolehan penjualan Aset Tetap		0
Aktivitas Investasi Lainnya		0
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Untuk Aktivitas Investasi	-	0
Arus Kas Dari Aktivitas Keuangan		
Pembayaran/Penerimaan Pinjaman		
Ekuitas/Modal		
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh Dari Aktivitas Keuangan	0	0

Page 1

Gambar 6. Menu laporan arus kas

f. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

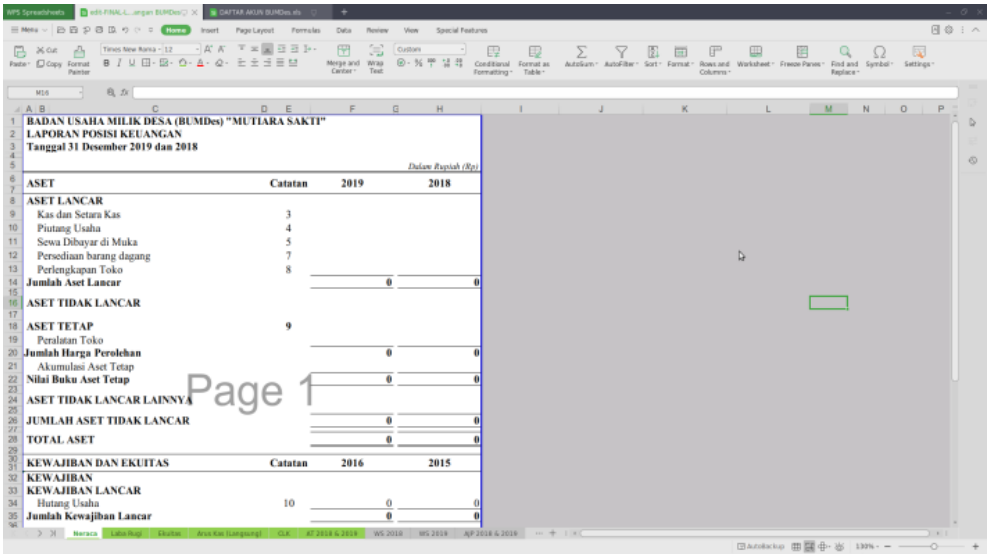

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) "MUTIARA SAKTI"
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

Dalam Rupiah (Rp)

ASET	Catatan	2019	2018
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	3		
Piutang Usaha	4		
Sewa Dibayar di Muka	5		
Persediaan barang dagang	7		
Perlengkapan Toko	8		
Jumlah Aset Lancar		0	0
ASET TIDAK LANCAR			
ASET TETAP	9		
Peralatan Toko			
Jumlah Harga Perolehan		0	0
Akumulasi Aset Tetap			
Nilai Buku Aset Tetap		0	0
ASET TIDAK LANCAR LAINNYA			
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		0	0
TOTAL ASET		0	0

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Catatan	2016	2015
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN LANCAR			
Hutang Usaha	10	0	0
Jumlah Kewajiban Lancar		0	0

Page 1

Gambar 7. Menu laporan posisi keuangan

5. SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pendampingan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes Mutiara Sakti yang telah dilaksanakan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: (1) Pendampingan dilakukan di BUMDes Mutiara Sakti yang berada di kabupaten Pesawaran, berjalan lancar dan kondusif. Respon Direktur, Bendahara, dan pegawai BUMDes Mutiara Sakti terhadap kegiatan pengabdian dirasa cukup baik. Hal itu tercermin dengan Bendahara yang memberikan data-data yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pengabdian ini, (2) Agenda turun lapangan kegiatan pendampingan dan penyusunan laporan keuangan BUMDes dilakukan setiap dua minggu sekali. Dari hasil penyusunan laporan keuangan, BUMDes terbantu dalam menyiapkan laporan keuangan yang sesuai SAK-ETAP, (3) Mitra mampu membaca dan menganalisis laporan keuangan yang menjelaskan kondisi keuangan pada saat tertentu, (4) Permasalahan yang dihadapi dapat terpecahkan, (5) Aplikasi dapat mempermudah pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan

sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat dan (6) Mitra mampu memahami pentingnya laporan keuangan bagi suatu lembaga.

Selain itu, ada beberapa saran yang penting untuk disampaikan dalam rangka meningkatkan kemampuan mitra dalam menyusun laporan keuangan: (1) Diperlukan pelatihan kepada para pengelola keuangan BUMDes yang ada di desa-desa agar mampu mahir mengoperasikan pelaporan keuangan menggunakan aplikasi ms.excel, (2) Harus ada pengembangan mengenai pelaporan keuangan kepada seluruh BUMDes agar memberikan kepercayaan kepada pengelola, (3) Perlu adanya struktur organisasi yang lebih jelas namun sederhana dan tidak terlalu banyak birokrasi dalam tatanan organisasi BUMDes.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada STIE Al-Madani dan mitra BUMDes Mutiara Sakti dalam penyelesaian artikel pengabdian untuk dipublikasi di Journal of Sriwijaya Community Services (Sricommerce). Terimakasih kami sampaikan kepada: Prof. Dr. Ir.Nanik Sriyani, M.Sc. (STIE Almadani, Bandar Lampung); Rofi Darojat , Lc., M.H. (STIE Almadani, Bandar Lampung); Shafitranata, S.E.I., M.M. (STIE Almadani, Bandar Lampung); Eha Nugraha, S.E., M.S.Ak., Akt., CA. (STIE Almadani, Bandar Lampung); Hi. Samsul Achsan (BUMDes Mutiara Sakti, Pesawaran); Eryuni Mutiah, S.Pd. (BUMDes Mutiara Sakti, Pesawaran).

REFERENSI

Badan Pusat Statistik (2019). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2019*. Jakarta: BPS RI.

Direktorat Bantuan Sosial. (2007). *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*. Jakarta: Departemen Sosial RI.

Dwidiyantini, K. A., Sulindawati, N. L. G. E., & Sujana, E. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan Manufaktur Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Tugu Sari Pajahan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1). https://doi.org/10.23887/jimat.v7i1.9381

Efferin, S., Darmadji, S. H., & Tan, Y. (2008). *Metode Penelitian Akuntansi, Mengungkap Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Harto, Prayogo P. & Riwandari, Ria (2018). Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*. Volume 6(2), hlm. 167-187.

Irawati, D., & Martanti, D. E. (2017). Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes Terhadap Pelaporan Aset Desa (Studi Fenomenologi Pada BUMDes Desa Karangbendo Kec Ponggok Kab. Blitar). *SNAPER-EBIS*, 41–51. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/6665

Kurniawan, & Firmansyah, I. (2018). Problem and Solution of Village Accounting Implementation Using Analytic Network Process. *International Journal of Management and Applied Science (IJMAS)*, 4(5), 52–56.

Kusmayadi, D., Firmansyah, I., & Rahamn, R. (2019). IbBM Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes dan Koperasi Nelayan di Desa Sancang Kabupaten Garut. *Jurnal Pengabdian Siliwangi*, 5(1), 54–62. http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jps/article/view/790

Lintong, J.S., Limpeleh, Esrie A.N., & Sungkowo, B. (2020). Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDes "Kineauan" Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. J*urnal Bisnis & Kewirausahaan*, 16 (1).

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes.

Sumaryadi, I. N., & Saputra, R. (2017). The Role of The Village Business Agency As Creative Economic Implementation in Order of Community Empowerment of Villages of Cagak Road

Subang District West Java Province. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 58(1), 8–21. https://www.tijoss.com/58th volume/I Nyoman TIJOSS Journal.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Yudiardi, D., & Karlina, N. (2017). Identification of Supporting and Inhibiting Factors of BUMDes (Village-Owned Enterprises) Village Development Planning in Sukarame District Garut. *Global Journal of Politics and Law Research*, 5(1), 1–14.

Yusnaini, Y., Dewi, K., Burhanudin, B., Hakiki, A., & Meirawati, E. (2020). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Harga Pokok Produksi pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, 1*(2), 63-68. doi:https://doi.org/10.29259/jscs.v1i2.22